ANALISIS VARIANS, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI BELANJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister

APRIYANTI SIREGAR
NIM. B2092221012

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama	: Apriyanti Siregar
NIM	: B2092221012
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	: Analisis Varians, Efektifitas, dan Efisiensi Belanja dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah pada Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 09 Juli 2025



Apriyanti Siregar
NIM. B2092221012

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Apriyanti Siregar

NIM : B2092221012

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Tesis : Analisis Varians, Efektifitas, dan Efisiensi Belanja dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah pada Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa seluruh isi tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak tulisan karya orang lain, maka saya bersedia **digugurkan hak saya menyandang Gelar Magister Akuntansi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Pontianak,09 Juli 2025



Apriyanti Siregar

NIM. B2092221012

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Analisis Varians, Efektivitas,dan Efisiensi Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Provinsi Kalimantan Barat

ini diajukan oleh:

Nama	:	Apriyanti Siregar
NIM	:	B2092221012
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian	:	28 November 2024

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam ujian Tesis dan Komprehensif untuk memenuhi gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dr. Syarbini Ikhsan, MM, CPA NIP. 196512201994021001	11/07-2025	
Pembimbing II	Umiaty Hamzani,SE, M.Com,Ph.D NIP. 198012182003122001	11/07-2025	
Penguji I	Dr. Muhsin, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., AseanCPA NIP. 197210012006041001	09/07-2025	
Penguji II	Rusliyawati,SE, M.Si, Ak, CA NIP. 197901272002122002	09/07-2025	

Pontianak, 09 Juli 2025
Mengetahui
Koordinator Program Studi

Elok Heniwati, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA
NIP. 1974~~02122~~000122001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha ESA, karena atas rahmat, dan karunia nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan pada tesis ini yang berjudul "Analisis Varians, Efektivitas dan Efisiensi Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Provinsi Kalimantan Barat" yang disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.

Perjalanan panjang telah penulis lewati dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat kehendak-Nya dan berkat dukungan dari berbagai pihak, maka tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, penulis dengan segala ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Elok Heniwati, S.E., M.Si., Ak., Ph.D., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi.
3. Bapak Dr. Syarbini Ikhsan, MM, CPA. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membantu banyak dalam akademik terkhusus telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan serta semangat pada penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Umiaty Hamzani,SE, M.com,Ph.D selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membantu banyak dalam akademik terkhusus telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan serta semangat pada penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Muhsin, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., AseanCPA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan juga kritik yang bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
6. Ibu Rusliyawati,SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan juga kritik yang bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
9. Orang tua dan saudara terkasih yang telah memberikan dukungan dan doanya selama penulis menjalani studi hingga mencapai penulisan tesis ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan.
10. Teman-teman dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang tertuju pada penulisan ini, penulis terima dengan lapang dada dan ikhlas. Semoga Tuhan yang Maha ESA. Dapat membalas segala kebaikan yang penulis terima. Akhir kata, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk semua pihak.

Pontianak, 09 Juli 2025

Apriyanti Siregar
NIM. B2092221012

ANALISIS VARIANS, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI BELANJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

Apriyanti Siregar

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Varians Belanja, Efektifitas, dan Efisiensi Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2022. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Dalam analisis ini untuk mengetahui tingkat varians belanja, efektifitas belanja, dan efisiensi belanja digunakan rasio varians, rasio efektifitas belanja, dan rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022 sudah baik. Tingkat varians mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan masuk kedalam kategori kriteria yang disukai. Tingkat efektifitas dan efisensi belanja menunjukan rata-rata yang baik dan masuk kedalam kategori sangat efektif dan efisien. Berdasarkan penelitian ini, penulis memberi saran kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat terus mempertahankan dan meningkatkan semua indikator penilaian dalam menilai kinerja keuangan daerah.

Kata Kunci : Varians Belanja, Efektifitas Belanja, Efisiensi Belanja, Kinerja Keuangan Daerah

Analysis Variance, Effectiveness, and Efficiency of Budgeting in Assessing Financial Performance in the Province of West Kalimantan

Apriyanti Siregar

Jurusan Akuntansi Fakutas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

This study aims to determine the level of Budgetary Variance, Effectiveness, and Efficiency of Budgeting in Assessing Financial Performance in the Province of West Kalimantan. The data used in this study is the Budget Realization Report of the West Kalimantan Provincial Government for 2019-2022. The data analysis method used is a qualitative descriptive method. This research was conducted by literature study, documentation and interviews. In this analysis to determine the level of spending variance, spending effectiveness ratio, and spending efficiency, the variance ratio, spending effectiveness ratio, and spending efficiency ratio were used. The result of the study show that the financial performance of the West Kalimantan Province in 2019-2022 is good. The level of variance has increased from year to year and is include in the category of preferred criteria. The level of spending effectiveness and efficiency show a good average and is include category of very effective and efficient. Based on this study, the author advises the West Kalimantan Provincial Government to continue to maintain and improve all assessment indicators in assesing regional financial performance.

Keywords: *Budgetary Variance, Budgetary Effectiveness, Budgetary Efficiency, Regional Financial Performance*

RINGKASAN TESIS

ANALISIS VARIANS, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI BELANJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Latar Belakang

Menurut Horngren Harrison, 2007:4 Akuntansi adalah suatu sistem yang menghasilkan informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam buku Pengantar Akuntansi saat ini keterampilan matematis memiliki peran penting dalam menganalisis permasalahan keuangan yang kompleks meskipun prosedur akuntansi semakin canggih, tujuan akhirnya bukan hanya menyediakan informasi, melainkan memberikan petunjuk untuk memilih tindakan terbaik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, mencatat, penggolongan, peringkasan serta penyajian atau laporan dari banyaknya transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna pengambilan Keputusan (Sunyanto,1999)

Dalam upaya mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, didukung dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai manifestasi dari konsep otonomi daerah. Terkait dengan hal ini, Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga mewajibkan Laporan Realisasi Anggaran untuk tidak hanya menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, tetapi juga menjelaskan prestasi kerja perangkat daerah (Nugrahmi, 2007).

Beberapa peraturan hukum yang menjadi pedoman dalam manajemen keuangan daerah melibatkan: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas, disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan melalui peraturan daerah. Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip transparansi mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan informasi yang paling jelas kepada publik mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ini mencakup langkah-langkah seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa agar dapat diakses oleh masyarakat umum.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian terhadap penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Pengendalian intern di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah disusun dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP dianggap sebagai suatu proses yang menyertai setiap aktivitas dan langkah yang terus-menerus dijalankan oleh para pimpinan dan seluruh pegawai, dengan maksud memberikan keyakinan yang memadai terkait keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskannya beberapa masalah yaitu Bagaimana pengukuran dan analisis varians belanja dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022? Bagaimana pengukuran dan analisis efektifitas belanja dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

pada tahun 2019-2022? Bagaimana pengukuran dan analisis efisiensi belanja dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan secara sistematis, serta mengetahui kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

4. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022. Sumber data yang digunakan berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat.

5. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang berfokus pada Varians, Efektifitas, dan Efisiensi Belanja Daerah. Jadi hubungan antara varians belanja, efektivitas, efisiensi, dan kinerja keuangan merupakan komponen penting dalam evaluasi dan pengelolaan anggaran. Varians yang besar bisa menandakan ketidakakuratan dalam perencanaan anggaran, atau bisa juga mencerminkan perubahan kondisi yang tidak terduga. Memahami varians ini membantu dalam menilai seberapa baik pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola anggaran mereka. Efektivitas belanja menunjukkan seberapa baik anggaran yang dialokasikan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penggunaan anggaran yang efektif berarti bahwa anggaran digunakan dengan cara yang mendukung pencapaian hasil yang positif dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Efisiensi belanja menunjukkan seberapa baik sumber daya digunakan tanpa pemborosan. Tingkat efisiensi yang tinggi berarti bahwa anggaran digunakan secara

optimal untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil perhitungan varians belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 – 2022, varians belanja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan masuk kategori kriteria yang cukup disukai. Pada tahun 2019 nilai total varians sebesar Rp167.844.840.312,44 dari total APBD, pada tahun 2020 nilai varians sebesar Rp124.099.147.013,37 dari total APBD, pada tahun 2021 nilai total varians sebesar Rp188.664.378.733,48 dari total APBD, pada tahun 2022 nilai total varians sebesar Rp113.473.628.803,18 dari total APBD.

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 – 2022. Pada tahun 2019 nilai efektivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 90,60% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 93,31% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 89,67% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2022 nilai efektivtas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 93,63% dengan kriteria efektif.

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 – 2022. Pada tahun 2019 nilai efisiensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 62,01% dengan kriteria cukup efisien. Pada tahun 2020 nilai efisiensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 97,07% dengan kurang kriteria efisien. Pada tahun 2021 nilai efisiensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 99,07% dengan kriteria kurang efisien. Pada tahun 2022 nilai efisiensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 99,16% dengan kurang kriteria efisien.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk penelitian yang dilakukan adalah peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan beberapa variabel dan menambahkan jumlah tahun pada Laporan Realisasi Anggaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT .....
PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL.....
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABERL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Manfaat Penelitian 8
1.4 Kontribusi Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Pemerintah Daerah 9
2.2 Anggaran 10
2.2.1 Definisi Anggaran
2.2.2 Penting nya Anggaran
2.2.3 Fungsi Anggaran
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 12
2.3.1 Definisi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah
2.3.2 Jenis Anggaran dan Pendapatan Belanja
2.4 Pendapatan Daerah 13
2.4.1 Pendapatan Asli Daerah
2.4.2 Dana Perimbangan
2.5 Laporan Realisasi Anggaran 15
2.5.1 Definisi Laporan Realisasi Anggaran
2.5.2 Dasar Laporan Realisasi Anggaran
2.5.3 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
2.6 Belanja Daerah 17
2.6.1 Klasifikasi Belanja Menurut Ekonomi

2.6.2 Definisi & Klasifikasi Belanja
2.6.3 Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi
2.6.4 Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi
2.7 Kinerja Pemerintah Daerah 21
2.7.1 Kinerja Mikro
2.7.2 Kinerja Program/Kegiatan
2.7.3 Kinerja Keuangan
2.7.4 Indikator Kinerja Keuangan Daerah
2.8 Varians Belanja 25
2.9 Rasio Efektifitas Belanja 25
2.10 Efisiensi Belanja 26
2.11. Penelitian Terdahulu 27
2.12. Kerangka Pemikiran 31
BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Objek Penelitian 33
3.2 Bentuk Penelitian 33
3.3 Jenis dan Sumber Data 33
3.3.1 Jenis Data
3.3.2 Sumber Data
3.4 Teknik Pengumpulan Data 34

3.5. Metode Analisis Data 35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.2 Pembahasan
4.2.1 Analisis Varians Belanja Pemerintah Prov Kalbar Tahun 2019-2022
4.2.2 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Prov Kalbar thn 2019-2022
4.2.3 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Prov Kalbar thn 2019-2022
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
5.3 Keterbatasan Penelitian
DAFTAR PUSTAKA 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022 7
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kinerja Efektifitas Belanja 26
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja 27
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 28
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja 36
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Kinerja Efektifitas Belanja 36
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Horngren Harrison, 2007:4 Akuntansi adalah suatu sistem yang menghasilkan informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam buku Pengantar Akuntansi saat ini keterampilan matematis memiliki peran penting dalam menganalisis permasalahan keuangan yang kompleks meskipun prosedur akuntansi semakin canggih, tujuan akhirnya bukan hanya menyediakan informasi, melainkan memberikan petunjuk untuk memilih tindakan terbaik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, mencatat, penggolongan, peringkasan serta penyajian atau laporan dari banyaknya transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna pengambilan Keputusan (Sunyanto,1999)

Dalam upaya mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, didukung dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai manifestasi dari konsep otonomi daerah. Terkait dengan hal ini, Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga mewajibkan Laporan Realisasi Anggaran untuk tidak hanya menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, tetapi juga menjelaskan prestasi kerja perangkat daerah (Nugrahmi, 2007).

Beberapa peraturan hukum yang menjadi pedoman dalam manajemen keuangan daerah melibatkan: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas, disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan melalui peraturan daerah. Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip transparansi mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan informasi yang paling jelas kepada publik mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ini mencakup langkah-langkah seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa agar dapat diakses oleh masyarakat umum.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian terhadap penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Pengendalian intern di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah disusun dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP dianggap sebagai suatu proses yang menyertai setiap aktivitas dan langkah yang terus-menerus dijalankan oleh para pimpinan dan seluruh pegawai, dengan maksud memberikan keyakinan yang memadai terkait keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Pilat dan Morasa (2019), terdapat beberapa metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan kemampuan keuangan daerah. Beberapa pendekatan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah mencakup evaluasi rasio kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di sisi Pemerintah, penting untuk menilai kinerja Pendapatan dan Belanja, karena pada umumnya, Pemerintah lebih fokus pada pengukuran kinerja keuangan

pendapatan dan belanja daerah melalui evaluasi program dan kegiatan yang dicantumkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Namun, evaluasi terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan masih kurang umum dilakukan. Untuk mengukur kinerja pendapatan dan belanja daerah, diperlukan penerapan teknik analisis keuangan yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja kedua aspek anggaran tersebut. Oleh karena itu, teknik yang sesuai untuk mengevaluasi kinerja keuangan dari pendapatan dan belanja daerah adalah Teknik Analisis Pendapatan Daerah dan Teknik Analisis Belanja Daerah. Pendekatan ini didasarkan pada teori yang diajukan oleh Mahmudi (2016) yang melibatkan Analisis Varians Pendapatan dan Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, dan Analisis Rasio Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah. Rasio ini mencakup Analisis Derajat Desentralisasi, Analisis Ketergantungan Daerah, Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Analisis Derajat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Analisis Keserasian Belanja Daerah, dan Analisis Efisiensi Belanja Daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah sejatinya mencerminkan kinerja keuangan dan ini terwujud dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, CaLK menyajikan beberapa informasi, termasuk data mengenai kinerja keuangan seperti rangkuman pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan beserta rintangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis varians belanja adalah metode rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dengan tujuan mengukur sejauh mana efisiensi dan penyerapan anggaran selama periode anggaran. Semakin kecil perbedaan antara realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, maka semakin baik hasil varians belanja tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019–2022 memiliki anggaran yang berfluktuasi, berikut ini data anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2019-2022:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Barat 2019-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2019	Rp1.785.423.976.202.00	Rp1.617.579.135.889.56	90,60%
2020	Rp1.799.641.120.003,98	Rp1.675.541.972.990,61	93,31%
2021	Rp1.826.922.969.965,00	Rp1.638.258.591.231,52	89,67%
2022	Rp1.781.868.414.131,00	Rp1.668.394.785.327,82	93,63%

Sumber : bkad, penyusunan anggaran, pelaporan

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2019-2022 dapat dilihat realisasi penyerapan anggaran belanja cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 presentase penyerapan anggaran belanja sebesar 90,60% pada tahun 2020 presentase penyerapan anggaran belanja sebesar 93,31%, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2021 presentase penyerapan anggaran belanja sebesar 89,67%, kemudian pada tahun 2022 penyerapan anggaran belanja kembali naik dengan presentase sebesar 93,63%. BPKP (dalam Nurul, Muhammad, 2017), menyebutkan semakin optimal penyerapan anggaran untuk realisasi kegiatan, maka akan berdampak pada semakin banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam pemerintah daerah harus fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif sehingga tidak menimbulkan uang daerah yang menganggur. Selain itu laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul "ANALISIS VARIANS, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI BELANJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT".

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, antara lain:

1. Bagaimana pengukuran dan analisis varians belanja dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022?
2. Bagaimana pengukuran dan analisis efektifitas belanja dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022?
3. Bagaimana pengukuran dan analisis efisiensi belanja dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022?

1.3 Manfaat penelitian

1. Untuk mengetahui varians belanja dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui efektivitas belanja dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui efisiensi belanja dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022.

1.4 Kontribusi Penelitian

Adapun hasil penellitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menjadi bahan acuan atau referensi dalam kegiatan penelitian varians belanja, efektifitas dan efisiensi belanja dalam menilai kinerja keuangan.
2. Kontribusi Praktis

   Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun suatu tolak ukur sudah sejauh mana varians belanja, efektifitas dan efesiensi pendapatan yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga dari hal tersebut dapat untuk meningkatkan kinerja penggunaan anggaran belanjanya untuk tahun periode yang akan datang.